KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

19 SEPTEMBER-25 SEPTEMBER 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI RAKOR KEMENIMIPAS 2026, PERKUAT KINERJA DAN INTEGRITAS PEMASYARAKATAN





Yogyakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 21-23 September 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kristiana Hambawani. Kegiatan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan langkah strategis dalam mewujudkan kinerja Kemenimipas yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi menekankan sejumlah temuan kritis dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, antara lain masih terdapat 95 usulan Pembebasan Bersyarat (PB) yang tertahan, 838 Litmas tertunda, serta perlunya perhatian terhadap integritas data pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hal tersebut menjadi perhatian bersama untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Aspek keamanan dan ketertiban turut menjadi perhatian utama. Jajaran pemasyarakatan diarahkan untuk menjaga suasana yang kondusif dan komunikatif dengan Warga Binaan, sekaligus bertindak tegas terhadap narkoba, lodes, dan penipuan.

Pengawasan serta pembinaan pegawai juga diperkuat melalui pengecekan indikasi judi online, pengawasan gaya hidup berlebihan, serta pembinaan khususnya bagi PNS baru. Kepala Kantor Wilayah juga ditekankan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kekompakan jajaran.

Rakor juga menyoroti pelaksanaan razia gabungan, mitigasi bencana, penguatan kehumasan, optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, pemanfaatan produk UMKM dan ketahanan pangan di Lapas/Rutan terus didorong, termasuk mengutamakan penggunaan produk yang benar-benar dihasilkan dari dalam Lapas/Rutan.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor Kemenimipas 2026, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan dan hasil evaluasi sesuai tugas dan fungsi, sekaligus memperkuat koordinasi di jajaran UPT Pemasyarakatan se-DIY. Penguatan integritas, keamanan, pelayanan publik, serta optimalisasi program pemasyarakatan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemasyarakatan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

KABID PP KANWIL DITJENPAS DIY DORONG PENGUATAN KEAMANAN MELALUI RAZIA GABUNGAN DI LAPAS NARKOTIKA YOGYAKARTA



YOGYAKARTA – Lapas Narkotika Sleman menjadi lokasi pelaksanaan razia gabungan yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/9). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban serta mencegah masuknya barang terlarang di lingkungan Lapas Narkotika Sleman.

Razia dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purwaningati Saputro. Kegiatan ini melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas DIY bersama Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan apel pagi. Selanjutnya, petugas dibagi menjadi lima regu untuk melakukan pemeriksaan kamar hunian secara acak. Petugas menyisir lima blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara teliti dengan sasaran pemeriksaan berupa handphone, narkoba, alat tajam, serta dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine secara acak.

Pemeriksaan oleh Polri, TNI, BNN, dan Kanwil Ditjenpas DIY juga mencakup area luar blok hunian untuk memastikan lingkungan tetap aman serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kepala Lapas Narkotika Sleman, Teguh Suroso, menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan (WBP) demi terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib.

Langkah tersebut diwujudkan melalui razia gabungan berkelanjutan yang hasilnya tidak menemukan handphone, narkoba, benda tajam, kekerasan, maupun pungli, meski petugas tetap mengamankan sejumlah barang berpotensi mengganggu seperti kartu poker dan korek api.

Melalui kegiatan preventif ini, sinergi antara Kanwil Ditjenpas DIY, Lapas Narkotika Sleman, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.



KANWIL DITJENPAS DIY GELAR CEK KESEHATAN GRATIS DAN SKRINING TBC



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan Puskesmas Pakualaman Yogyakarta menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining tuberkulosis (TBC), Rabu (23/9). Bertempat di Kanwil Ditjenpas DIY, kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai dan peserta MagangHub Batch 1 Tahun 2026 di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemantauan kesehatan serta deteksi dini faktor risiko penyakit.

Dokter Kepala Puskesmas Pakualaman, Ika Maharani, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi kesehatan peserta. Sebelum menjalani pemeriksaan, peserta CKG terlebih dahulu melakukan pengisian skrining kesehatan dan pemindaian barcode kesehatan.

“Screening dimulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kemudian pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan gula darah, konsultasi gigi, maupun skrining tuberkulosis (TBC),” jelas Ika.

Menurut Ika Maharani, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Salah satunya melalui pemeriksaan kadar gula darah dan faktor risiko lainnya yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan peserta. Sementara itu, skrining TBC dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan adanya faktor risiko tuberkulosis sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purwaningati Saputro, menyampaikan bahwa CKG merupakan salah satu langkah untuk membantu pegawai dan peserta MagangHub mengenali kondisi kesehatannya.

“Melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis ini, kami berharap seluruh pegawai dan peserta magang dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat lebih memperhatikan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan,” ujar Ina.

Pemeriksaan diawali dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Peserta juga menjalani pemeriksaan laboratorium sederhana melalui pengambilan sampel darah untuk mengetahui kadar gula darah, konsultasi gigi, serta skrining TBC.

Seluruh hasil pemeriksaan kemudian dicatat dan diinput sebagai skrining awal kondisi kesehatan peserta. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan sekaligus membantu mengidentifikasi faktor risiko yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Apabila hasil skrining menunjukkan adanya keluhan atau faktor risiko, seperti tekanan darah tinggi maupun kadar gula yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Peserta dapat melakukan registrasi untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut maupun memperoleh rujukan ke Faskes 1 atau Pukesmas Pakualaman Yogyakarta sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kondisi kesehatan masing-masing.

Melalui pelaksanaan CKG dan skrining TBC, Kanwil Ditjenpas DIY berharap kesadaran pegawai dan peserta MagangHub terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat serta mendorong penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

KANWIL DITJENPAS DIY TERIMA KUNJUNGAN KERJA DITJENPAS, BAHAS VALIDASI DATA DAN PENGUATAN LAYANAN TAHANAN

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan kerja jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Rabu (23/9). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Ditjenpas DIY tersebut membahas rencana pelaksanaan kegiatan validasi data serta uji petik pada sejumlah satuan kerja Pemasyarakatan di wilayah DIY.



Kunjungan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak, Davy Bartian, bersama jajaran Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas. Berdasarkan agenda yang telah disusun, kegiatan validasi dilaksanakan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Rumah Tahanan Lain, sekaligus melakukan validasi data tahanan, bantuan hukum, overstaying, serta tahanan yang berada di luar Rutan induk atau cabang Rutan. Kegiatan juga mencakup peninjauan penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik.

Dalam pertemuan tersebut, Davy menyampaikan bahwa kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan layanan Pemasyarakatan, sekaligus menggali data serta informasi faktual sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang telah berjalan. Peninjauan akan dilakukan pada sejumlah satuan kerja, di antaranya Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Rutan Kelas IIB Wonosari, dan Rutan Kelas IIB Wates.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purnaningati Saputro menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kedatangan jajaran Ditjenpas ke Yogyakarta dan berharap seluruh temuan maupun masukan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan kepada jajaran Kanwil Ditjenpas DIY sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama.

“Terima kasih atas kunjungannya ke Yogyakarta. Kami berharap apabila selama pelaksanaan kegiatan ditemukan hal-hal yang perlu menjadi perhatian maupun ada masukan, dapat disampaikan kepada jajaran Kanwil Ditjenpas DIY. Hal tersebut tentu akan menjadi bahan perbaikan bagi kami dan seluruh jajaran,” ujar Ina.

Kegiatan validasi dan uji petik tersebut selanjutnya akan dilaksanakan pada 23 hingga 25 September 2026. Berdasarkan rundown, tim dijadwalkan melakukan validasi pada Rutan Kelas IIB Wates, Rutan Kelas IIB Wonosari, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, serta Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

KANWIL DITJENPAS DIY DORONG OPTIMALISASI SISTEM SPSE DAN INTEGRASI INAPROC DI SATUAN KERJA WONOSARI





Yogyakarta — Kanwil Ditjenpas DIY terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pengadaan yang akuntabel. Melalui Tim Satuan Pelaksana (Satpel) IV Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Kanwil Ditjenpas DIY menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Umum Pengadaan (RUP), E-Purchasing, hingga Kepatuhan Proses PBJ di Aula Bapas Kelas II Wonosari, Rabu (23/9).

Kegiatan Monev ini menyasar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Operator SiRUP dari seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan di wilayah Wonosari, meliputi Lapas Kelas IIB Wonosari, LPP Kelas IIB Wonosari, LPKA Kelas II Yogyakarta, dan Bapas Kelas II Wonosari. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk percepatan dalam mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan target predikat minimal Baik pada tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam sesi pemaparan teknis, Tim PBJ menekankan pentingnya pengoptimalan fitur transaksional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada paket Pengadaan Langsung, pengerjaan E-Kontrak, serta percepatan pencatatan non-tender. Selain itu, jajaran satker diinstruksikan untuk selalu memperbarui data RUP apabila terjadi penyesuaian anggaran, serta secara konsisten memprioritaskan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proses pengadaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung pemenuhan indikator ITKP setiap satker yang ditargetkan selesai paling lambat 28 September 2026, sekaligus pembimbingan pendaftaran akun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui portal INAPROC sebagai bagian dari persiapan pengalihan akses SiRUP secara terpusat. Harapannya pendampingan intensif ini dapat mengatasi kendala teknis di lapangan sehingga melalui sinergi dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, seluruh satker Kanwil Ditjenpas DIY mampu memenuhi target ITKP tepat waktu.

OPTIMALKAN REGULASI TAHANAN, TIM DIRYANTAH DITJENPAS UJI PETIK VALIDASI DATA DI DIY



YOGYAKARTA - Tim Direktorat Pelayanan Tahanan (Diryantah) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja dan uji petik lapangan ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan serta instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (24/9). Langkah ini dilakukan untuk memvalidasi data krusial terkait penanganan tahanan sekaligus menghimpun bahan guna penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RaperMen) tentang Pengelolaan Rumah Tahanan Lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, tim Ditjenpas mendapat pendampingan langsung dari Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY. Adapun pengambilan data dan koordinasi dilakukan secara intensif di empat lokasi target, yakni Rutan Kelas IIB Wates, Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Wonosari, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.

Fokus utama pengumpulan data di lapangan mencakup tiga isu strategis: inventarisasi dan pemutakhiran hak bantuan hukum bagi warga binaan, hingga pemetaan keberadaan serta kondisi operasional tahanan di cabang rutan/tempat penahanan di luar rutan induk. Selain itu, tim juga mengevaluasi kesiapan serta kendala teknis pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (online) pada tingkat banding bagi kelompok Tahanan dan Anak.

Hasil pemantauan dan validasi data riil dari Rutan Wates, Rutan Yogyakarta, Lapas Wonosari, dan BNNP DIY tersebut nantinya akan diolah sebagai landasan empiris dalam penyusunan RaperMen Pengelolaan Rumah Tahanan Lain. Regulasi baru ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menyeragamkan standar tata kelola tahanan di luar rutan induk, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar tahanan terlaksana secara optimal dan terukur.

Hasil pemantauan dan validasi data riil dari Rutan Wates, Rutan Yogyakarta, Lapas Wonosari, dan BNNP DIY tersebut nantinya akan diolah sebagai landasan empiris dalam penyusunan RaperMen Pengelolaan Rumah Tahanan Lain. Regulasi baru ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menyeragamkan standar tata kelola tahanan di luar rutan induk, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar tahanan terlaksana secara optimal dan terukur.

Melalui sinergi antara Tim Diryantah Ditjenpas dan Penyuluh Hukum Kanwil Ditjenpas DIY ini, diharapkan hasil rekapitulasi data lapangan dapat menyajikan gambaran komprehensif atas kondisi pelayanan tahanan di daerah.



EVALUASI KINERJA, KANWIL DITJENPAS DIY SIAPKAN LANGKAH PERCEPATAN TARGET KINERJA AKHIR TAHUN

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat evaluasi kinerja dan persiapan tindak lanjut Rapat Kerja Teknis (Rakernis), Kamis (24/9). Bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas DIY, rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, dan diikuti jajaran pimpinan, pejabat fungsional madya, serta ketua tim kerja di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY.

Rapat diawali dengan evaluasi terhadap capaian kinerja Kanwil Ditjenpas DIY. Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih. Berdasarkan hasil penilaian, Kanwil Ditjenpas DIY tidak termasuk dalam lima wilayah dengan capaian terendah, namun juga belum berada dalam lima wilayah dengan capaian tertinggi. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus dorongan untuk melakukan percepatan perbaikan.

Kakanwil menyampaikan kembali arahan Menteri bahwa pelaksanaan Rakernis harus menghasilkan perubahan yang lebih baik serta memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Dengan penilaian berikutnya yang akan dilakukan pada Desember, seluruh jajaran diminta segera menindaklanjuti hasil Rakernis dan mengoptimalkan waktu yang tersedia. Kanwil Ditjenpas DIY pun berkomitmen meningkatkan capaian kinerja dan mendorong agar pada penilaian Desember dapat masuk dalam lima besar.

Rapat juga mengevaluasi data Inspektorat terkait pemenuhan tindak lanjut Barang Milik Negara (BMN). Setelah dilakukan konfirmasi, data yang masih tercatat tersebut merupakan data lama dan berkaitan dengan temuan tahun 2024. Kanwil akan melakukan penguatan kembali pada penilaian Desember agar tindak lanjut yang telah dilaksanakan dapat tercermin sesuai kondisi sebenarnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil Rakernis sebagai pijakan dalam melakukan perbaikan kinerja secara terukur.

DEPUTI BAPPENAS APRESIASI KEBERHASILAN PROSES REINTEGRASI SOSIAL JAJARAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH DIY



YOGYAKARTA - Direktur Pembangungan Hukum, HAM, Imipas Hendra Wahanu Prabandani melaksanakan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja Pemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (25/9). Kegiatan tersebut turut didampingi langsung oleh Kanwil Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan meninjau secara langsung Griya Abhipraya Purbonegoro Bapas Kelas I Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengukur efektivitas pelaksanaan program Pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian klien Pemasyarakatan serta mempersiapkan mereka untuk kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung berbagai aktivitas dan program yang dilaksanakan di Griya Abhipraya Purbonegoro Bapas Kelas I Yogyakarta. Keberadaan GA Purbonegoro menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses pembimbingan dan pemberdayaan klien Pemasyarakatan, sehingga mereka memiliki bekal keterampilan, kemandirian, serta kesiapan yang lebih baik dalam menjalani proses reintegrasi sosial.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu klien menghadapi berbagai tantangan dalam proses reintegrasi, sekaligus memperkuat dukungan lingkungan agar mereka mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif.

“Luar biasa di Yogyakarta ini bisa berjalan dengan baik, bahkan pidana sosialnya juga sudah saling mendukung antar instansi terkait, ini menjadi potret keberhasilan yang bisa menjadi contoh secara nasional." tutur Hendra.



Melalui monitoring dan evaluasi secara langsung, pelaksanaan program Pemasyarakatan diharapkan terus berkembang sesuai kebutuhan klien dan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemasyarakatan untuk menghadirkan pembimbingan yang berkelanjutan dan humanis.

MONEV DI LAPAS YOGYAKARTA, BAPPENAS APRESIASI DAN DUKUNG LAPAS YOGYAKARTA JADI PERCONTOHAN NASIONAL





YOGYAKARTA – Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imipas, Hendra Wahanu Prabandani, melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, Jumat (25/9). Kegiatan tersebut didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY, Muhammad Ali Syeh Banna.

Pelaksanaan monev menjadi bagian dari upaya mengukur efektivitas berbagai program Pemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kesiapan reintegrasi sosial, serta keberlanjutan pendampingan setelah kembali ke masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Hendra memfokuskan tinjauan pada penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan WBP di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Peninjauan mencakup pelaksanaan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang menjadi bagian penting dalam mempersiapkan WBP agar memiliki bekal keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Pada akhir kunjungan, Hendra menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Ia menilai sejumlah praktik yang ditemui selama kunjungan dapat menjadi contoh yang dapat diterapkan di satuan kerja Pemasyarakatan lainnya.

"Menurut saya dari kunjungan ini yang kami dapatkan sebagai teladan, mulai dari kolaborasi yang dilakukan untuk memberikan pembinaan bersama stakeholder, lingkungannya bersih. Saya pikir ini merupakan contoh yang baik, bisa dilaksanakan Lapas-Lapas yang lain. Sekali lagi apresiasi untuk Lapas Kelas IIA Yogyakarta," tutur Hendra menutup kunjungan.

Melalui monitoring dan evaluasi secara langsung, pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta diharapkan terus diperkuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan WBP. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemasyarakatan untuk menghadirkan pembinaan yang berkelanjutan, meningkatkan kemandirian WBP, serta mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.

@pemasyarakatanjogja

RANGKUMAN KEGIATAN SIDANG TPP MINGGU INI PADA KANWIL DITJENPAS DIY

DORONG PEMENUHAN HAK WBP DAN MITIGASI OVERKAPASITAS



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) merangkum rangkaian pendampingan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sepanjang minggu ini, mulai 23 hingga 25 September 2026. Langkah intensif ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Binaan berjalan transparan, akuntabel, serta menjadi solusi strategis dalam menekan overkapasitas hunian.

Rangkaian sidang diawali di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta pada Rabu (23/9), dilanjutkan di Lapas Kelas IIB Sleman dan LPKA Kelas II Yogyakarta pada Kamis (24/9), serta diakhiri di Rutan Kelas IIB Wates pada Jumat (25/9). Pelaksanaan sidang dihadiri oleh tim TPP masing-masing UPT, perwakilan Kanwil Ditjenpas DIY, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Yogyakarta, Wali Pemasyarakatan, serta WBP yang bersangkutan.

Dari hasil evaluasi dan penelaahan kelengkapan berkas minggu ini, Sidang TPP di Lapas Narkotika Yogyakarta menyetujui pengusulan integrasi bagi 35 WBP (24 Pembebasan Bersyarat/PB dan 11 Cuti Bersyarat/CB), remisi keterlambatan administrasi 17 orang, mutasi WBP 1 orang, penunjukan tutor dan tamping masjid 13 orang, serta rujukan medis ke rumah sakit untuk 5 orang. Sementara itu, Sidang TPP Lapas Sleman menyetujui usulan integrasi 12 WBP dan pemindahan 1 WBP atas permintaan kepolisian.

Pada LPKA Kelas II Yogyakarta, sidang memberikan rekomendasi persetujuan program integrasi bagi 1 Anak Binaan. Adapun di Rutan Kelas IIB Wates, tim TPP menyetujui usulan remisi keterlambatan administrasi untuk 2 WBP serta pengusulan integrasi dan penempatan kerja bagi 3 WBP. Pertimbangan keputusan didasarkan pada pemenuhan syarat administratif, substantif, asesmen risiko, rekam jejak perilaku selama pembinaan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan rangkaian Sidang TPP minggu ini menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas DIY dalam memperkuat sinergi dengan UPT Pemasyarakatan. Melalui verifikasi dan evaluasi berkala yang terukur, Kanwil Ditjenpas DIY memastikan setiap kebijakan reintegrasi sosial dan pengelolaan warga binaan berjalan sesuai standar operasional guna mendukung stabilitas keamanan dan kualitas pembinaan di wilayah DIY.



KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 25 September 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY